



RENJA

RENCANA KERJA

<https://polppkabkapuashulu.blogspot.com/p/renja-2024.html>



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359

Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email satpolpp@kapuashulukab.go.id

PUTUSSIBAU 78711

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang melimpahkan berkat dan rahmat Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Putussibau, Juli 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BAHTYAR, S.P., M.Si.
Pemula Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.3.1 Maksud.....	3
1.3.2 Tujuan.....	3
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	4
BAB II.....	5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	25
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	27
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	38
BAB III.....	40
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	40
3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	41
3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	43
BAB IV	50
PENUTUP.....	50

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD 6

Tabel 2. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD 9

Tabel 2. 3 Realisasi Gaji dan Tunjangan 2022..... 18

Tabel 2. 4 Realisasi Gaji & Tunjangan Triwulan II 2023 18

Tabel 2. 5 Realisasi Dokumen Akuntansi 2022 19

Tabel 2. 6 Realisasi Pengumpulan SKP 2022 20

Tabel 2. 7 Daftar Sistem Informasi (SPBE) Satpol PP 22

Tabel 2. 8 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23

Tabel 2. 9 Pajak Kendaraan, BBM dan Suku Cadang/ Service 23

Tabel 2. 10 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP dan Satlinmas..... 24

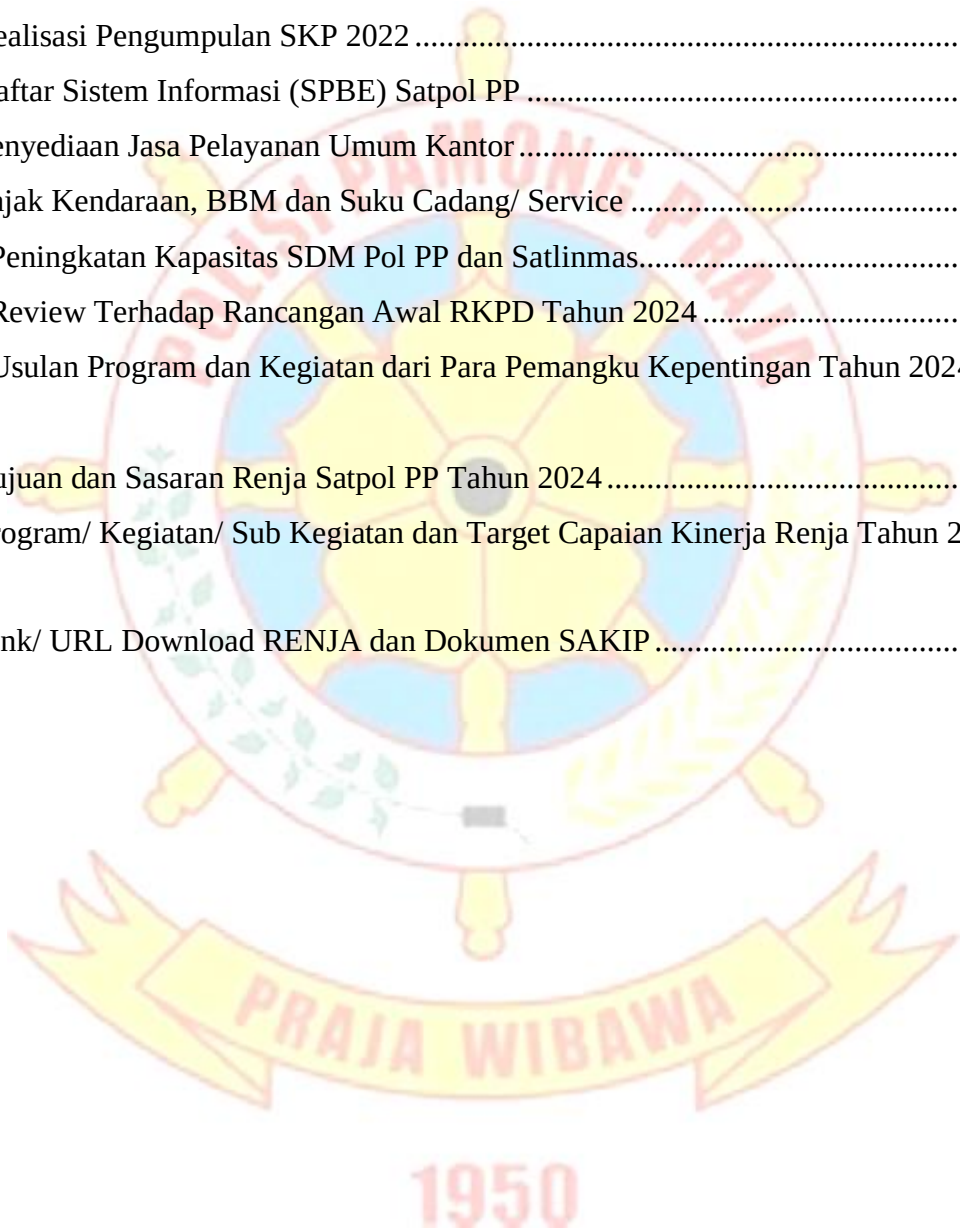
Tabel 2. 11 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 28

Tabel 2. 12 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024..... 39

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2024 42

Tabel 3. 2 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja Tahun 2024..... 45

Tabel 4. 1 Link/ URL Download RENJA dan Dokumen SAKIP 51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKPA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mana nantinya akan digunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rancana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
19. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2023 tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah:

- a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan

- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA dan Dokumen Anggaran;
- f. Sebagai patokan serta evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

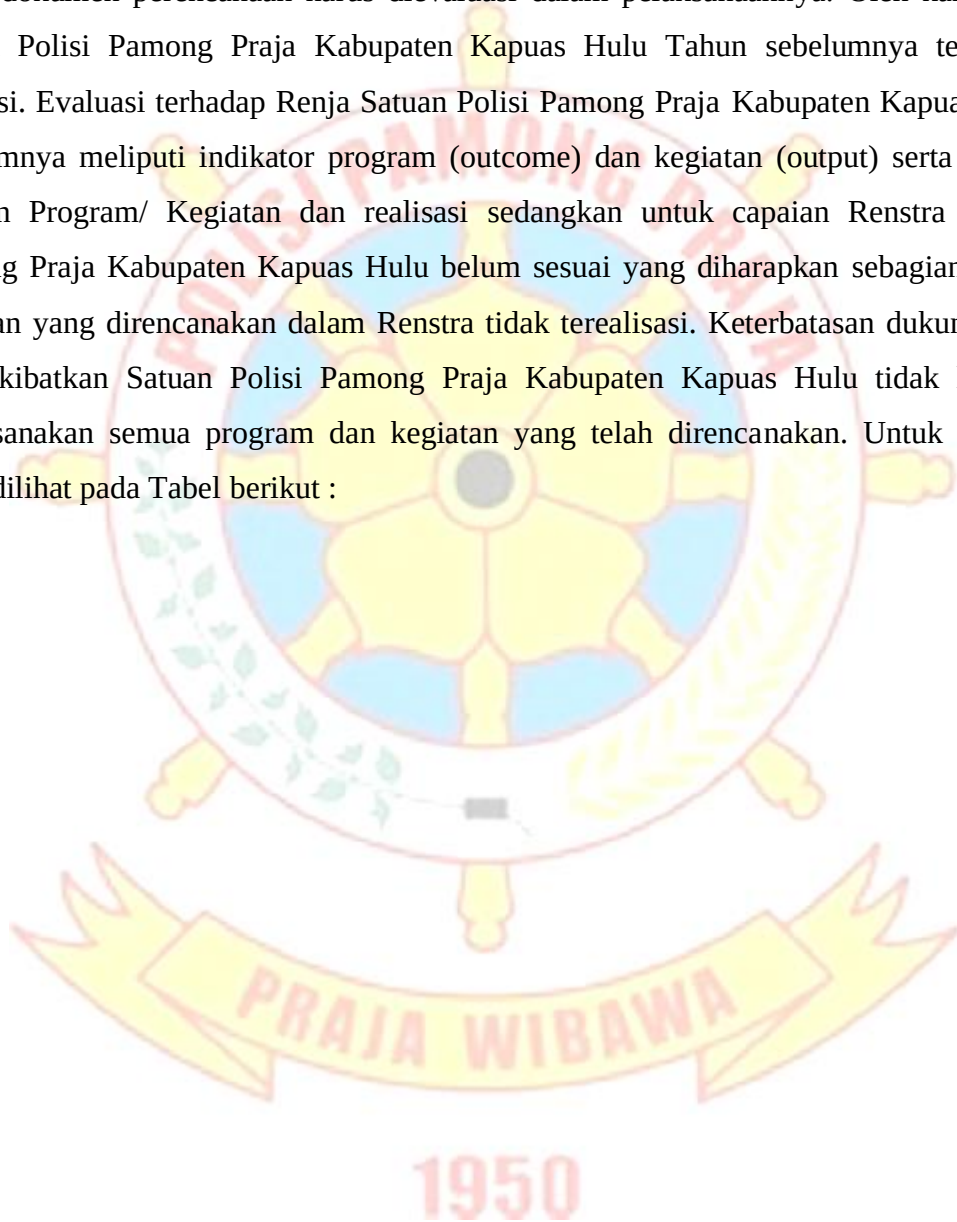
BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun sebelumnya telah dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun sebelumnya meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program/ Kegiatan dan realisasi sedangkan untuk capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai yang diharapkan sebagian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tidak terealisasi. Keterbatasan dukungan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tidak leluasa dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi kinerja hasil program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun/n-1) 2023	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/4)*	12
05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
xx	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	100	100	RPJMD
01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	26,01	0	25,01	25,48	101,88	25,26	25,37	97,54%	
		Nilai SAKIP	A	BB	BB	B	83,33	BB	80,95	80,95%	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A	BB	BB	B	83,33	BB	80,95	80,95%	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	95%	98,42%	95%	98,92%	104,13	95%	97,45%	102,58%	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	95%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0,00%	0,00%	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	95%	100%	95%	61,87%	65,12	95%	85,62%	90,13%	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	

01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	99,54%	95%	98,44%	103,62	95%	97,66%	102,80%	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	100%	0%	0%	#DIV/0!	0%	33,33%	35,09%	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	95,62%	95%	99,52%	104,76	95%	96,71%	101,80%	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	87%	93,62%	90%	89,32%	99,25	89,00%	90,65%	104,19%	
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00%	
		Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00%	
		Rasio Petugas LINMAS	2,00	0,84	0,96	0,87	90,85	1,60	1,11	55,26%	
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	246	181	213	154	72,30	720	352	142,95%	
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/Perkada yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00%	
		Rasio Petugas LINMAS	2,00	0,84	0,96	0,87	90,85	1,60	1,11	55,26%	

		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	246	181	213	154	72,30	720	352	142,95%	
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00%	
02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang Aktif	60%	0%	0%	0%	#DIV/0!	33,33%	11,11%	18,52%	

Keterangan Warna:
Menjadi Bahan Evaluasi (Tidak Mencapai Target dan Melebihi Target)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Hasil analisis untuk menetapkan kinerja Tahun 2024 menggunakan data realisasi n-1 dan n-2 serta berdasarkan hasil Evaluasi baik secara internal maupun Hasil Evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Dari hasil analisis capaian kinerja pada dua tahun sebelumnya serta dari hasil evaluasi internal/ evaluator maka dilakukan perbaikan/ penyempurnaan sehingga diperoleh proyeksi untuk tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kode	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Permendagri 18 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	(tahun n- 2)	(tahun n- 1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
xx	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum			100	100	100	100	100	100	100	100	RPJMD
01	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP			0,00	25,01	25,26	25,51	25,48	25,48	25,26	25,51	
	Nilai SAKIP			0	BB	BB	BB	BB	B	BB	BB	
01.2.01.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16	16	16	16	14	16	16	16	
01.2.01.02	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	
01.2.01.03	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4	4	4	4	4	4	1	1	
01.2.01.04	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	
01.2.01.05	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			4	4	4	4	4	4	2	2	Penyempurnaan dan DPPA

01.2.01.06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			28	28	28	28	24	25	26	26	SPM menjadi Tanggungjawab Umum dan Aparatur
01.2.01.07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8	8	8	8	4	7	8	8	Evaluasi SAKIP & RB
01.2.02	Persentase Administrasi Keuangan			95,00	95,00	95,00	95,00	98,42	98,92	95,00	95,00	
01.2.02.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12	2.540	2.550	2.560	-	2.354	2.260	2.270	
01.2.02.03	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			147	156	156	156	-	376	190	190	
01.2.02.04	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0	70	70	70	-	135	135	135	
01.2.02.05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0	1	1	1	-	1	1	1	
01.2.02.06	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			0	1	1	1	-	0	1	1	Tanggapan terjadi apabila terdapat temuan
01.2.02.07	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			0	4	4	4	-	-	0	4	
01.2.02.08	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0	1	1	1	-	-	0	1	

01.2.03	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah			0	95	95	95	-	-	0	95	
01.2.03.01	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0	1	1	1	-	-	0	1	
01.2.03.03	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0	1	1	1	-	-	0	1	
01.2.05	Persentase Administrasi Kepegawaian			95,00	95,00	95,00	95,00	100,00	61,87	95,00	95,00	SKP sering menjadi permasalahan
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0	6	8	10	-	-	0	5	
01.2.05.02	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			87	1	1	1	1	-	0	1	Baju PDL
01.2.05.03	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			0	2	2	2	4	4	4	4	DUK & Nominatif
01.2.05.05	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0	676	676	676	-	452	576	580	SKP
01.2.05.09	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0	6	8	10	-	-	0	5	
01.2.06	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			95,00	95,00	95,00	95,00	99,54	98,44	95,00	95,00	
01.2.06.01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			13	1	1	1	1	1	1	1	
01.2.06.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			18	1	2	2	1	1	1	1	HT, PC/ Laptop, Printer

01.2.06.03	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1	1	1	1	1	-	0	1	
01.2.06.04	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			106	1	1	1	1	1	1	1	
01.2.06.05	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			18	1	1	1	1	1	1	1	
01.2.06.06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			4	48	48	48	48	48	48	48	
01.2.06.07	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan			0	1	1	1	-	-	0	1	
01.2.06.08	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			0	5	5	5	-	-	0	1	
01.2.06.09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			31	180	182	184	41	406	182	184	
01.2.06.11	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			161	13	14	15	-	13	18	19	
01.2.07	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			95	95	95	95	100	-	0	95	
01.2.07.02	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0	7	9	11	-	-	0	4	Mobil Pamwal, Mobil Kasat, 2 Motor Pamkat
01.2.07.05	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			13	1	1	1	1	-	0	1	
01.2.07.06	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0	3	1	1	-	-	0	5	
01.2.07.09	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	0	1	1	-	-	0	0	

01.2.07.10	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	0	1	1	-	-	0	0	
01.2.07.11	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	0	1	1	-	-	0	0	
01.2.08	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95,00	95,00	95,00	95,00	95,62	99,52	95,00	95,00	
01.2.08.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			715	715	751	788	715	-	400	788	
01.2.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	144	145	146	-	159	144	144	
01.2.08.03	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			29	29	31	33	26	29	25	33	
01.2.08.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			110	126	131	136	-	660	759	770	
01.2.09	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK			90,00	90,00	89,00	88,00	93,62	89,32	89,00	88,00	
01.2.09.02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9	14.632	15.071	15.523	19.274	11.726	10.015	15.523	
01.2.09.08	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			1	1	1	1	1	1	1	1	
01.2.09.09	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	1	1	1	-	-	0	1	

02	Persentase penegakan Perda/Perkada			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Rasio Petugas LINMAS			0,95	0,96	0,97	0,98	0,84	0,87	1,60	2,00	
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			125	213	218	225	181	154	250	300	
02.2.01	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	
02.2.01.01	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			1.500	50	55	60	-	22	24	24	
02.2.01.02	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			1.500	12	14	17	-	8	12	12	
02.2.01.03	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			0	4	4	4	-	0	1	1	

02.2.01.04	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			30	64	66	67	30	32	33	33	
02.2.01.05	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			125	213	218	225	181	154	270	400	
02.2.01.10	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			4	10	10	10	1	0	8	8	SPM Ganti Rugi (Realisasi Rendah adalah Kinerja Terbaik)
02.2.02	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada			100	100	100	100	100	100	100	100	
02.2.02.01	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/			0	3	5	8	-	0	3	3	2022 adalah Publik Hearing
02.2.02.02	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1.500	360	360	360	-	523	560	560	Kegiatan Patroli
02.2.02.03	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			0	5	6	7	-	8	5	7	
02.2.03	Persentase PPNS yang Aktif			0,00	33,33	40,00	45,00	-	0,00	0,00	45,00	
02.2.03.01	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan			0	1	1	1	-	-	0	1	2 Orang 1 Laporan

	Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada											

Keterangan Warna:

- Menjadi Bahan Evaluasi (Tidak Mencapai Target/ Melebihi Target/ Revisi Target Renstra)
- Mengalami Perbaikan/ Penyempurnaan/ Perubahan

Sumber:

- <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renstra-2021-2026/>
- <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kinerja-2021/>
- <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kinerja-2022/>
- <https://bit.ly/Rapat-Reviu-Renja-2024>



Berdasarkan tabel tersebut diatas terdapat beberapa indikator kinerja yang mengalami perbaikan/ penyempurnaan berdasarkan hasil analisis evaluasi kinerja. Analisis perbaikan dengan melihat hasil pelaksanaan realisasi tahun n-2, n-1 dan sampai Triwulan II tahun berjalan dengan tetap mempertimbangkan hasil rapat evaluasi setiap triwulannya, maka diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD

Pada awal perencanaan ditetapkanlah Dokumen Perubahan sebanyak 4 Dokumen yang terdiri dari Dokumen Perubahannya sendiri dengan 3 kali revisi dokumen perubahan. Berdasarkan hasil analisis bahwa dokumen revisi pada perubahan RKA tidak menjadi bagian dari perhitungan kinerja melainkan dokumen yang sudah ditetapkan oleh pejabat berwenang dan telah menjadi dokumen Sah. Dalam hal ini telah terjadi kesalahan terhadap pemahaman tentang Dokumen perubahan RKA sehingga pemahaman yang seharusnya adalah dokumen Perubahan Anggaran (n) yang dilakukan perencanaan terhadap perubahannya bukan Dokumen RKA (n+1) yang mengalami revisi.

2. Indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD

Sama halnya dengan indikator sebelumnya (Perubahan RKA), pemahaman Perubahan DPA seharusnya Dokumen Perubahan (n) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang bukan tahapan revisi dokumen Perubahan anggaran (n). Semula pada perencanaan awal ditetapkan sebanyak 4 dokumen maka berdasarkan hasil perbaikan maka ditetapkan menjadi 2 dokumen yang terdiri dari Dokumen Pergeseran/ Penyempurnaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA).

3. Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Pada Perencanaan awal, perencanaan tahun sebelumnya serta pada dokumen Renstra, ditargetkan orang (ASN) yang menerima Gaji dan Tunjangan sebesar 2.540-2.560 OB. Penentuan target yang terlalu besar ini ditentukan dari perkiraan jumlah pejabat Struktural terisi penuh serta Staf ASN yang akan mendekati usia pension. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2023 terdapat perubahan peraturan terkait beberapa pejabat Eselon IV yang dilantik menjadi pejabat Fungsional. Dan beberapa pejabat Fungsional yaitu Kepala Sub Bagian Program saat ini telah terjadi kekosongan. Terdapat beberapa ASN yang telah pension dan perekrutannya sampai dengan saat ini belum ada.

4. Indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan

Perhitungan awal pada dokumen perencanaan dokumen penatausahaan terdapat kesulitan dalam menentukan jumlah dokumen yang akan ditargetkan sehingga dilakukan perkiraan ditargetkan sebanyak 156 Dokumen. Namun pada akhir Tahun 2022 realisasi didapat sebesar 376 terdiri dari:

Tabel 2. 3 Realisasi Gaji dan Tunjangan 2022

Bulan	SPP		SPM		Jumlah
	Gaji	Non Gaji	Gaji	Non Gaji	
1	2	3	4	5	8
Januari	4	0	4	0	8
Februari	2	2	2	2	8
Maret	1	7	1	7	16
April	4	15	4	15	38
Mei	5	2	5	2	14
Juni	3	8	3	8	22
Juli	7	11	7	11	36
Agustus	4	12	4	12	32
September	5	12	5	12	34
Oktober	4	14	4	14	36
November	4	8	4	8	24
Desember	3	51	3	51	108
TOTAL	46	142	46	142	376

Sumber: Laporan Kinerja 2022

Sedangkan pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Realisasi Gaji & Tunjangan Triwulan II 2023

Bulan	SPP			SPM			TOTAL
	Gaji	Non Gaji	Jumlah	Gaji	Non Gaji	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	2	0	2	2	0	2	4
Februari	1	1	2	1	1	2	4
Maret	1	6	7	1	6	7	14
April	6	3	9	6	3	9	18
Mei	4	6	10	4	6	10	20
Juni	6	6	12	6	6	12	24
Juli			0			0	0
Agustus			0			0	0
September			0			0	0
Oktober			0			0	0
November			0			0	0
Desember			0			0	0
TOTAL	20	22	42	20	22	42	84

Sumber: Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan dari realisasi pada table diatas dapat diperkirakan bahwa sampai dengan triwulan IV akan terealisasi sebesar $84 \times 2 = 168$ sehingga diperkirakan akan terealisasi sebesar 190 Dokumen.

5. **Indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD** sama halnya dengan permasalahan pada indikator sebelumnya terdapat kesulitan dalam penentuan dokumen Akuntansi yang begitu banyak sehingga dikhawatirkan akan terdapat begitu banyak lonjakan dan penurunan kinerja karena dokumen Akuntansi dapat dikatakan bersifat fleksibel/ insidentil.

Tabel 2. 5 Realisasi Dokumen Akuntansi 2022

No	Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen Selesai				Jumlah
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	BKU	3	3	3	3	12
2	SPJ Fungsional	3	3	3	3	12
3	SPJ Administratif	3	3	3	3	12
4	BAPK	3	3	3	3	12
5	RPK	3	3	3	3	12
6	Register SPP	3	3	3	3	12
7	Register SPM	3	3	3	3	12
8	Register SP2D	3	3	3	3	12
9	BSB	3	3	3	3	12
10	BKT	3	3	3	3	12
11	Buku Pajak	3	3	3	3	12
12	Buku Besar	0	0	0	1	1
13	Buku Jurnal Umum	0	0	0	1	1
14	Rincian Objek	0	0	0	1	1
15	Kwitansi	∞	∞	∞	∞	0
TOTAL		33	33	33	36	135

Sumber: Laporan Kinerja 2022

Berdasarkan table tersebut diatas terdapat dokumen Kwitansi (berwarna merah) bersifat fleksibel atau tak terhingga atau tidak dapat ditentukan jumlahnya. Setiap bidang melakukan pengajuan dalam 1 kegiatan dapat menggunakan 1 kwitansi apabila ingin melakukan pencairan sekaligus, akan tetapi apabila penarikan menginginkan dipecah penarikan 1 kegiatan kedalam beberapa kali penarikan. Sehingga diputuskannlah bahwa dokumen Kwitansi tidak termasuk kedalam perhitungan capaian kinerja walaupun termasuk dalam dokumen akuntansi sehingga ditetapkan sebesar 135 Dokumen yang dikerjakan sesuai dengan realisasi tahun 2022.

6. Indikator Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Indikator ini telah disepakati bahwa menggunakan SKP dalam perhitungan capaian kinerjanya. Hampir sama halnya dengan indikator Gaji dan Tunjangan yang pada semulanya ditentukan berdasarkan jumlah pegawai yang tersedia pada awal perencanaan dan sampai dengan akhir tahun pelaporan kinerja terdapat beberapa pegawai yang pindah dan pension. Permasalahan lain yang menyebabkan rendahnya capaian pada tahun 2022 yaitu jumlah SKP yang terkumpul hanya mencapai 66,86% pegawai yang menyampaikan SKP. Capaian SKP pada tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 6 Realisasi Pengumpulan SKP 2022

No	Nama	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BAHTIAR, S.P., M.Si.	Instansi Lain/Pensiun	Instansi Lain/Pensiun	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
2	WALIDAD, S.E., M.M.	OK	OK	OK	OK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
3	YOSEF JASMAN, S.E.	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
4	H. AFDHAL YASIER, S.H., S.Hut., M.M.	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
5	EDY SUHARDI, S.Sos.	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum TTD	Belum	Belum	Belum	Belum
6	PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK, S.E.	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
7	SUHAIRI	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
8	SUPRAPTO, A.Md., Kep.	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
9	SILVESTER ROMMY, S.S.	OK	OK	OK	OK	OK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
10	Hj. DAYANG ISNIATI, S.E., M.M.	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum
11	NATALIA SIMPUNG,S,E, M.A.P	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
12	AZMIYANSYAH, S.IP.	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
13	JAWAWI, S.E.	OK	OK	OK	OK	OK	Belum	Belum	Belum	Belum
14	HARIANSYAH, A.Md.	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
15	LYDIA YULIAMJA,S.E.	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
16	UTILIA	OK	OK	OK	OK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
17	SULASTRI	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
18	SUPARDJI	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
19	KURNIADI, S.E.	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
20	ENDAH TRIWULANDARI	OK	OK	OK	OK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
21	HUSNOL ARIFIN	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
22	YANUARIUS MENINGAN	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
23	GATOT SUHANDI S.IP	Belum TTD	Belum TTD	Belum TTD	Belum TTD	Belum TTD	Belum TTD	Belum	Belum	Belum
24	AKHMAD TABRI	OK	OK	OK	OK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
25	JUMMADI	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
26	RAHMAT MOLLIADI	OK	OK	OK	OK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
27	DIDAKUS	OK	OK	OK	Belum TTD	OK	Belum	Belum	Belum	Belum
28	JOKO AS	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum

29	SYAIFUL ANWAR	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
30	SAINI	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
31	AHMAD KADARUDIN	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
32	WAHYU SAFITRI	OK	OK	OK	OK	Belum TTD	Belum TTD	Belum TTD	Belum TTD	Belum TTD
33	ACING SYAFRIANSYAH	OK	OK	OK	OK	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
34	ISKANDI	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
35	A.M.DEDY SETIADI	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Instansi Lain/Pensiun	Instansi Lain/Pensiun	Instansi Lain/Pensiun
36	AGUSTINUS TRI HENDRAWANTO	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
37	BAMBANG ERAWADI	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
38	EDY JUNPHIKTOR	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
39	RACHMAT BISTIAR	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
40	DAMIANUS AMBO	OK	OK	Sudah	OK	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
41	HERI KURNIADI	Sudah	Sudah	Belum TTD	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
42	EKNASIUS IMRAN	OK	OK	OK	OK	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
43	ZIBNU JIMMY HABIBIE ACHBAR	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum
44	SYAHBANIANTO	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
45	YULIUS	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK	LINK
46	SUKARDI	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
47	WILLY AMRIE	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
48	ABDUL WAHID	Belum TTD	Belum TTD	Belum TTD	Belum TTD	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
49	ARIF IRAWAN	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
50	ILHAM WATHANNUDIN	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
51	AGNES DEVUNG	Instansi Lain/Pensiun				Instansi Lain/Pensiun		Instansi Lain/Pensiun		Instansi Lain/Pensiun
52	ILHAMSYAH	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum
Sudah Terupload		34	34	34	34	23	18	18	18	17
TOTAL YANG BELUM		57,17%		14		14		14		
TOTAL YANG SUDAH		42,83%		36		36		37		

Sumber: [https://bit.ly/SKP_2022 Pol PP](https://bit.ly/SKP_2022_Pol_PP)

Belum

Belum TTD

Instansi Lain/Pensiun

Pada Tahun 2022 begitu banyak PNS yang tidak menyampaikan SKP. Permasalahan utama adalah kurangnya pengetahuan PNS dalam mengoperasikan computer serta kurangnya kesadaran Pegawai tentang pentingnya dokumen SKP dalam penilaian Kinerja dan penilaian SAKIP keseluruhan. Berdasarkan capaian yang rendah tersebut dengan telah dikeluarkannya nilai SAKIP 2022 yang semula BB turun menjadi B sehingga menjadi perhatian khusus pimpinan terhadap SKP sehingga pada tahun 2023 berdasarkan hasil rapat disepakati dengan surat edaran bahwa TPP tidak akan dicairkan apabila tidak menyampaikan SKP.

7. Indikator Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Dengan berkembangnya teknologi informasi serta kewajiban melaksanakan SPBE pada setiap SKPD maka semakin hari semakin banyak system informasi yang diperlukan demi

kelancaran sebuah pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi. Pada tahun 2022 hanya terdapat sebanyak 13 sistem Informasi sedangkan dalam perjalanan tahun 2023 sudah mencapai 18 sistem informasi yang digunakan bahkan telah terdapat berbagai system informasi baru, Adapun system informasi tersebut dapat dilihat sbagai berikut:

Tabel 2. 7 Daftar Sistem Informasi (SPBE) Satpol PP

No	Nama Sistem Informasi	Tahun Penggunaan	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1	Absen Finger Scanner	1	1
2	CMS	1	1
3	LAPOR! www.lapor.go.id	1	1
4	Monev https://monev.lkpp.go.id/	1	
5	PPID https://ppid.kapuashulukab.go.id	1	1
6	satpolpp.kapuashulukab.go.id	1	1
7	SILPPD	1	1
8	SIPD https://kapuashulukab.sipd.kemendagri.go.id/daerah	1	1
9	SIPKD http://akrual.dppkadh.id/	1	1
10	SIP Pol PP https://satpolpp.kemendagri.go.id	1	1
11	SIRUP www.lkpp.go.id	1	1
12	SMEP https://smep.kapuashulukab.go.id/	1	1
13	sakup.kapuashulukab.go.id dan https://esr.menpan.go.id/	1	1
14	Admin E-cataloc		1
15	Admin Satu Data		1
16	https://spm.bangda.kemendagri.go.id/		1
17	Sijaf & Pemetaan Pengelolaan Pol PP		1
18	Pengelola Arsip		1
19	Simjalin		1
TOTAL		13	18

Sumber: DPA 2022 dan DPA 2023

8. Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator ini menggunakan laporan kinerja berupa penggunaan materai pada dokumen surat menyurat. Penentuan target indikator ini bergantung kepada jumlah anggaran yang tersedia. Penggunaan materai sangat penting dan sangat banyak dalam adminstrasi pelaporan dan dokumen lainnya seperti kwitansi pengajuan anggaran, dokumen Perjanjian, Dokumen Kontrak dan lain sebagainya. Penggunaan materai pada tahun 2021 telah tereailsasi sebanyak 715 buah materai yang dibeli/ digunakan. Namun pada tahun 2022 tidak dianggarkan mengingat keterbatasan anggaran sehingga materai menggunakan uang pribadi untuk membelinya. Pada awal perencanaan tahun 2023 ditargetkan sebesar 300 materai dan pada pergeseran/ penyempurnaan anggaran ditambah sehingga menjadi 400 buah materai.

9. Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

Pada awal perencanaan, baik pada dokumen Renstra dan Renja tahun sebelumnya, ditargetkan sebesar 126-136 laporan. Adapun perbedaan perencanaan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 8 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Indikator	Satuan	2022	2023
1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan:		<u>660</u>	<u>759</u>
	- Jumlah ATK yang dibeli	Paket/ Jenis	1 Paket	45 Jenis
	- Jumlah Tenaga Kontrak yang menerima Honorarium	OB	636	708
	- Jumlah Iklan yang disediakan	Iklan	15	0
	- Pembayaran Honorarium Petugas Layanan Aduan Pelanggaran Perda/ Perkada	OB	8	6

Sumber: Perjanjian Kinerja 2022 dan 2023

Pada Tahun 2022 pembelian ATK menggunakan system Kontrak paket sedangkan pada tahun 2023 tidak menggunakan kontrak/ paket sehingga perhitungan kinerja menggunakan laporan perjenis belanja yang dibeli. Jumlah tenaga kontrak bertambah pada tahun 2022 sebanyak 54 orang dan pada tahun 2023 bertambah menjadi 58 orang. Penyediaan Iklan pada tahun 2022 saja dan tidak pada tahun 2023. Pembayaran honorarium petugas layanan aduan hanya dianggarkan 6 bulan perorang. Penentuan target pada indikator ini bersifat fleksibel dan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

10. Indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Indikator ini terdiri dari beberapa item seperti berikut:

Tabel 2. 9 Pajak Kendaraan, BBM dan Suku Cadang/ Service

No	Indikator	Satuan	2022	2023
1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		<u>14.632</u>	<u>10.015</u>
	- Pembayaran Pajak Kendaraan	Unit	8	8
	- BBM	Liter	14.600	9.969
	- Suku Cadang/ Service	Jenis	24	38

Penggunaan bahan bakar BBM dipengaruhi oleh intensitas kegiatan kunjungan kerja pejabat kesetiap daerah. Pada Tahun 2022 begitu tingginya mobilitas para pejabat kepala daerah serta kegiatan PAMWAL yang membutuhkan jumlah anggota minimal 5 orang setiap kegiatan kepala daerah. Dengan telah semakin memburuknya kondisi mobil PAMWAL Satpol PP dengan telah terjadi kecelakaan sebanyak 2 kali mengharuskan banyaknya pergantian suku cadang dan service.

11. Indikator Rasio Petugas LINMAS

Pada Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi secara serentak diseluruh Indonesia baik pemilihan presiden, kepala daerah dan anggota dewan sehingga persiapan untuk personal Linmas sangat dibutuhkan pada saat Pengamanan TPS berlangsung. Salah satu persiapannya adalah dengan melakukan perekrutan Linmas untuk setiap TPS mewajibkan sebanyak minimal 2 orang/ TPS. Sehingga indikator yang semula Linmas/ RT diubah menjadi Linmas/ TPS. Berdasarkan SPM Satpol PP mewajibkan anggota Linmas 1 Orang/ RT. Sedangkan peraturan KPU mewajibkan sebanyak 2 orang linmas/ TPS. Sehingga dibuatlah rasio petugas linmas adalah 2 orang/ TPS. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 1,60 Linmas/ TPS dan diharapkan pada tahun 2024 sudah mencapai 2,00 Linmas/ TPS.

12. Indikator Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan

Perhitungan target indikator dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 10 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP dan Satlinmas

No	Indikator	Satuan	2022	2023
1	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		213	720
	- Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	Orang	53	500
	- Jumlah Peserta Kegiatan Kesamaptaan	Orang	70	100
	- Jumlah Peserta Kegiatan Bela Diri	Orang	70	100
	- Jumlah Peserta Pelatihan Linmas	Orang	20	20

Sumber: Perjanjian Kinerja 2022 dan 2023

Pada Tahun 2022 jumlah SDM yang mengikuti kegiatan ditargetkan sebanyak 213 dengan realisasi hanya sebesar 154 dengan capaian hanya mencapai 72,30%. Rendahnya capaian ini disebabkan sedikitnya partisipasi peserta dalam pelaksanaan kegiatan serta padatnya kegiatan sehingga peserta yang hadir menjadi sangat sedikit. Pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 720 anggota mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM. Namun sampai dengan triwulan II 2023 baru terealisasi sebesar 76 orang dengan capaian hanya 10,56%. Capaian yang rendah ini disebabkan oleh kegiatan Dalmas dan Kesamaptaan dilaksanakan pada Triwulan III. Permasalahan yang sangat serius pada kegiatan Bela Diri yang baru hanya dilaksanakan 1 kali kegiatan. Semula ditargetkan sebanyak 10 kegiatan dengan masing-masing kegiatan sebanyak 50 orang. Permasalahannya yaitu bahwa para pelatih tidak berada ditempat pada saat akan dilaksanakan kegiatan. Sehingga rencananya akan digeser kegiatan ini pada kegiatan kesamaptaan, Dalmas, PBB dan Diksar sehingga pada tahun 2023 ditargetkan hanya 270 orang dan diproyeksikan pada tahun 2024 sebanyak 400 Orang.

13. Indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Indikator ini menggunakan Laporan Patroli dalam mengukur capaian kinerjanya dan pada awal perencanaan ditargetkan sebanyak 360 kali kegiatan patroli dengan perhitungan patrol dilakukan setiap hari sekali dalam setahun. Namun dalam perjalannya patroli tidak dilakukan setiap hari dan hanya dilaksanakan pada hari kerja serta hari yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran trantibum. Patroli juga dilakukan sebanyak 2 kali atau 3 kali dalam sehari tergantung dari kondusifitas situasi. Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 Patroli telah dilakukan sebanyak 283 dengan asumsi $283 \times 2 = 566$ kegiatan patrol setahun, sehingga ditargetkan Kembali sebanyak 560 pada tahun 2023 dan 2024.

2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakkan perundangn-undangan daerah.
- c. Pelaksanaan kordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dengan aparat kepolisian negara dan atau lembaga lainnya.
- d. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- f. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kapuas Hulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan Visi Bupati Kapuas Hulu yaitu **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL"**

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

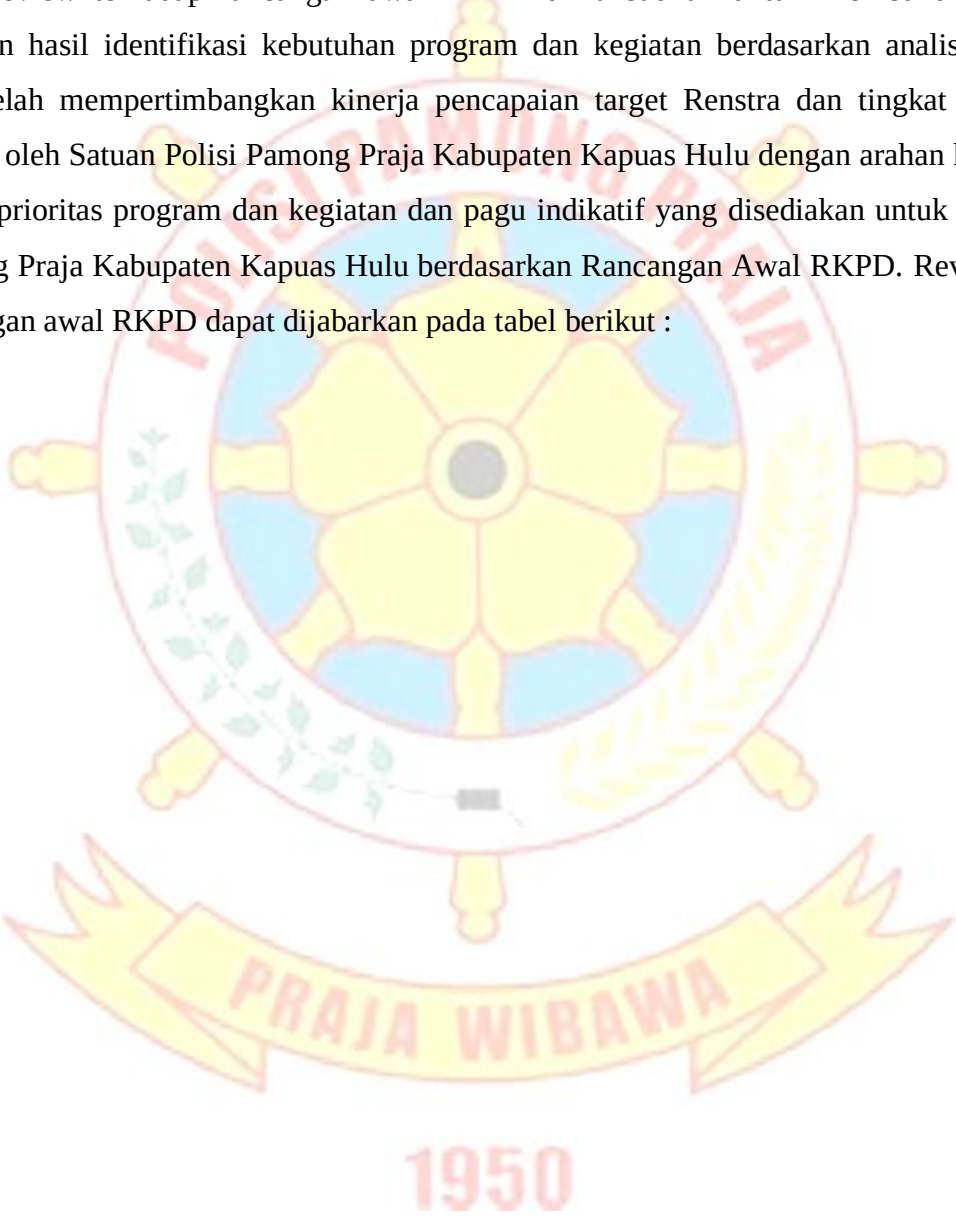
Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. Koordinasi antar instansi lemah;
2. Ketaatan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada sangat kurang;
3. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Peralatan dan Perlengkapan Operasional Penegkan Perda/ Perkada belum memadai;
5. Jumlah Anggota Operasional yang belum memadai;
6. Kurangnya sosialisasi tentang Perda/ Perkada ke masyarakat;
7. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat;
8. Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang;
9. Kurangnya Peran Serta masyarakat dalam menjaga kewanibawaan lingkungan;
10. Tidak adanya Peralatan dan Perlengkapan anggota LINMAS;
11. Penerapan SPM Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda/ Perkada;
12. Anggota banyak yang tidak hadir dalam kegiatan seperti Dalmas dan Kesamaptaan;
13. Anggota LINMAS Desa tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan;
14. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
15. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai;
16. Jumlah anggota Satpol PP yang belum memadai;
17. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
18. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
19. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan;

- 20. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
- 21. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba;
- 22. Kenakalan remaja dan pelajar;
- 23. Jumlah Pos Kamling yang tidak ideal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut :



Tabel 2. 11 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
xx	Meningkatnya kondusivitas wilayah		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	RPJMD	Meningkatnya kondusivitas wilayah		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	RPJMD	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					12.119.439.161	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					11.190.430.821
1.05.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,51	10.872.124.071	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,51	10.120.460.981	
			Nilai SAKIP	BB				Nilai SAKIP	BB		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	BB	95.660.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	BB	82.437.000	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	23.071.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	15.000.000	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	9.164.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	9.164.000	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	11.663.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	11.663.000	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10.622.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10.622.000	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	11.948.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	11.948.000	

1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	14.040.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26	14.040.000	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	15.152.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	10.000.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan	95	6.372.439.521	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Administrasi Keuangan	95	6.372.439.521	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.560	6.099.009.521	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.270	6.099.009.521	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	156	235.976.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	190	235.976.000	
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	70	28.825.200	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	135	28.825.200	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3.580.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3.580.200	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	2.556.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	2.556.800	

1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	2.491.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	2.491.800	
1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen BahanTanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	95	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	95	2.000.000	
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1.000.000	
1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1.000.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian	95	106.758.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian	95	41.000.000	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5		
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	72.608.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	30.000.000	
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	28.810.100	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	5.000.000	
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	676	5.340.100	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	580	5.000.000	
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	1.000.000	

1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	648.472.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	400.803.710	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	21.478.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	9.000.000	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	120.615.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	42.583.710	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	4.731.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	5.000.000	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	196.416.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	70.000.000	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	21.078.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	15.000.000	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48	5.794.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48	6.120.000	
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	Penyediaan Bahan/Material	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1.000.000	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1.000.000	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184	240.558.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184	200.000.000	
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15	37.800.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19	51.100.000	

1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	1.329.040.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	1.030.000.000	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11	1.141.180.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	1.000.000.000	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	28.180.000	Pengadaan Mebel	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	10.000.000	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	159.680.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	20.000.000	
1.05.01.2.07.0009						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
1.05.01.2.07.0010						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
1.05.01.2.07.0011						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	1.994.580.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	1.993.780.750	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	715	4.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	788	4.000.000	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	70.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	70.800.000	
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33	17.250.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33	17.250.000	

1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	136	1.901.730.750	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	770	1.901.730.750	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	88,00	325.172.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	88,00	198.000.000	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15.523	315.492.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15.523	183.000.000	
1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	9.680.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	15.000.000	
1.05.01.2.09.0009						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penegakan Perda/Perkada	100	1.247.315.090	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penegakan Perda/Perkada	100	1.069.969.840	
			Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100				Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100		
			Rasio Petugas LINMAS	0,98				Rasio Petugas LINMAS	2,00		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	225				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100	1.120.193.010	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100	802.100.000	
			Rasio Petugas LINMAS	0,98				Rasio Petugas LINMAS	2,00		

			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	225				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300		
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33	157.229.800	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33	110.000.000	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213	153.922.500	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300	130.000.000	
1.05.02.2.01.0006						Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	1.000.000	
1.05.02.2.02.0005						Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	1.000.000	
1.05.02.2.01.0010						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	10	1.000.000	

						Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional					
1.05.02.2.01.0011						Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	2	1.000.000	
1.05.02.2.01.0012						Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	5	1.000.000	
1.05.02.2.01.0013						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	1.000.000	
1.05.02.2.01.0014						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	50	1.000.000	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	24	740.976.910	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	24	500.000.000	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	12	62.963.800	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	50.000.000	

			yang Dilakukan Penindakan								
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0	0						
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	10	5.100.000	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	8	5.100.000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	127.122.080	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	64.869.840	
1.05.02.2.02.0004						Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	1.000.000	
1.05.02.2.02.0005						Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	1.000.000	
1.05.02.2.02.0006						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	2	1.000.000	
1.05.02.2.02.0007						Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	5	1.000.000	

							Kepala Daerah			
1.05.02.2.02.0008						Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	4	1.000.000
1.05.02.2.02.0009						Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	4	1.000.000
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	3	18.869.840	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	18.869.840
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	5	79.532.500	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	7	20.000.000
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	360	28.719.740	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	560	20.000.000
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase PPNS yang Aktif	33,33	0	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase PPNS yang Aktif	100	203.000.000
1.05.02.2.03.0002						Pembentukan Sekretariat PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1	1.000.000
1.05.02.2.03.0003						Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1	1.000.000

1.05.02.2.03.0004	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	0	0	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	2	200.000.000	
1.05.02.2.03.0005						Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1	1.000.000	
TOTAL					12.119.439.161		-			11.190.430.821	

Sumber: - <https://bit.ly/Ranwal-Renja-2024>
- <https://bit.ly/Renja-2024-SIPD>
- Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

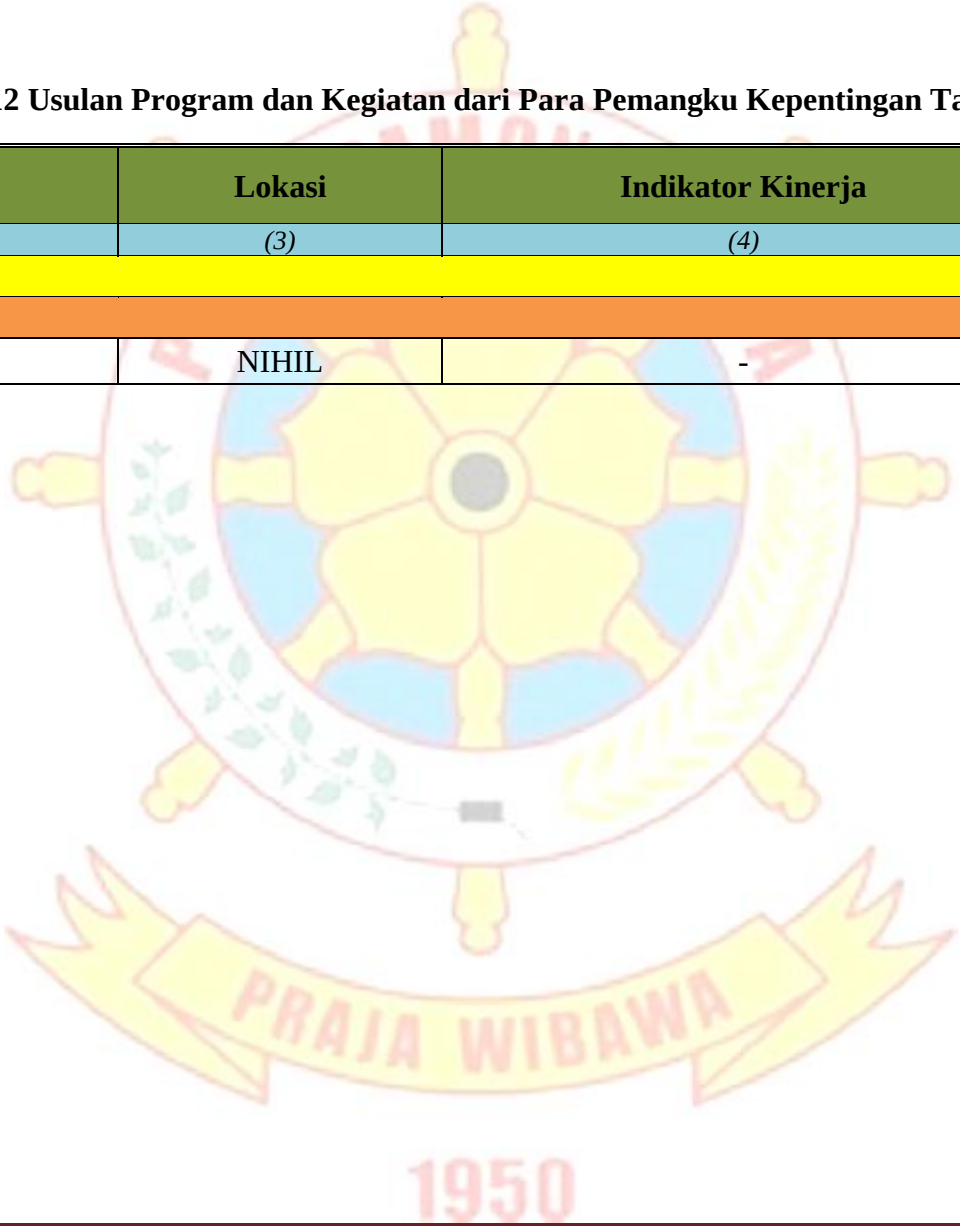
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh SKPD Kabupaten Kapuas Hulu yang mana terdapat beberapa usulah terkait peningkatan gangguan keamanan dan trantibum serta perlindungan masyarakat.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 12 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL	NIHIL	-	-	-



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan *Local accountability* pemerintah terhadap rakyatnya.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu

sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Bupati Tahun 2021-2026. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 sesuai dengan [Renstra 2021-2026](#) adalah :

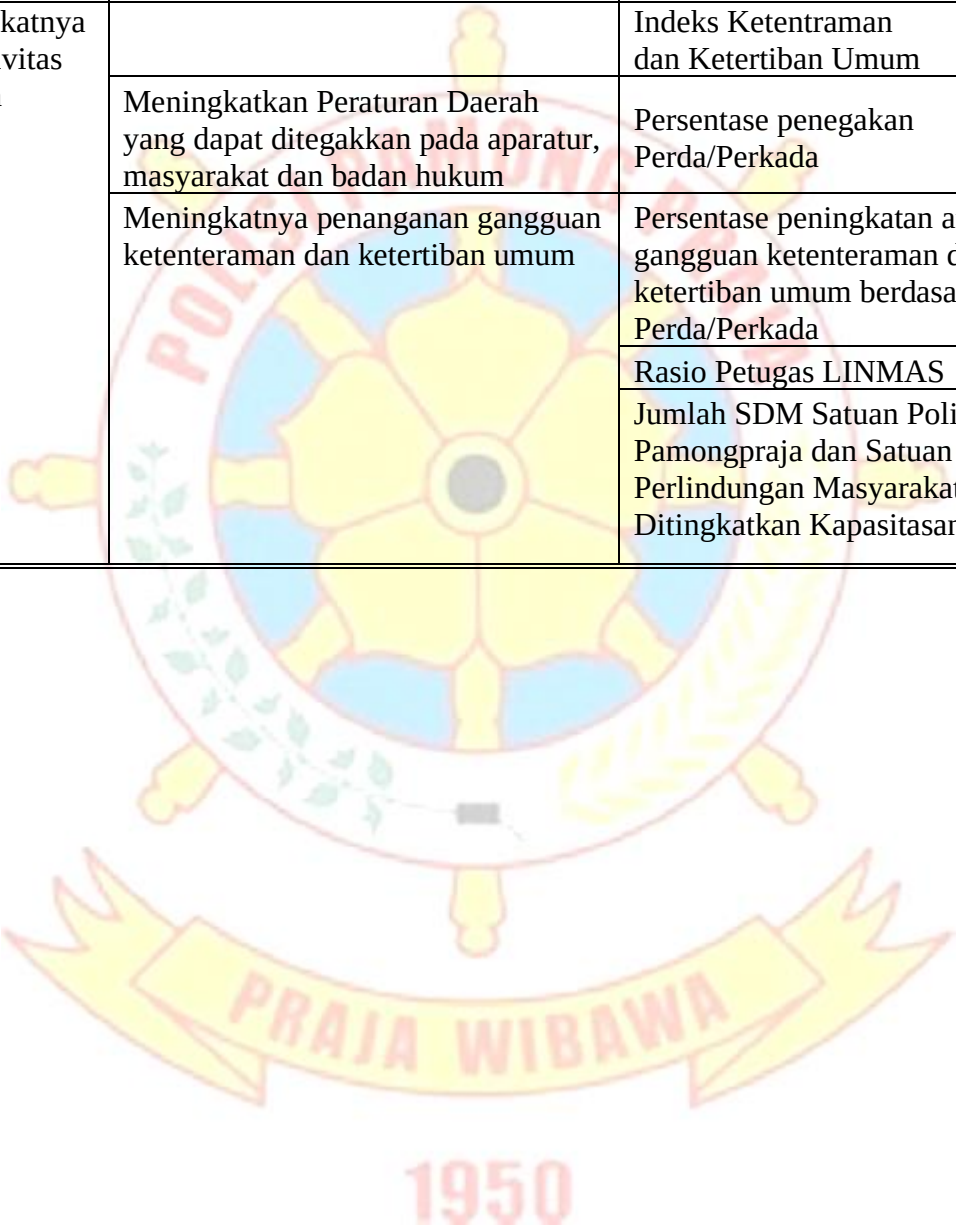
- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Meningkatkan kondusivitas wilayah.

Adapun sasaran dari Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- b. Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparaturnya, masyarakat dan badan hukum;
- c. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,51
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,51
			Nilai SAKIP	BB
2	Meningkatnya kondusivitas wilayah		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
		Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%
			Rasio Petugas LINMAS	2,00
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300



3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 2 program dan 7 Kegiatan dengan 32 Sub Kegiatan.

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan nilai SAKIP Satpol PP secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 7 Kegiatan dengan 32 Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Sasaran 2 : Meningkatnya kondusivitas wilayah

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan kondusivitas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 3 kegiatan dengan 25 Sub Kegiatan yaitu

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
 - Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP
 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
- Pembentukan Sekretariat PPNS
 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS

Tabel 3. 2 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	2023	Satuan	2024		2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Target		Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RPJMD	Meningkatnya kondusivitas wilayah			Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Indeks	100		100		RPJMD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,26	Indeks	25,51	10.120.460.981	25,76	11.780.730.256	Kasat
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,26	Indeks	25,51	10.120.460.981	25,76	11.780.730.256	
				Nilai SAKIP	BB	Pedikat	BB		A		
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	Predikat	BB	82.437.000	A	86.558.850	Sekretariat
		1.05.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dok.	16	15.000.000	16	15.750.000	Sub Bagian Program
		1.05.01.2.01.00.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok.	1	9.164.000	1	9.622.200	
		1.05.01.2.01.00.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok.	1	11.663.000	1	12.246.150	
		1.05.01.2.01.00.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok.	1	10.622.000	1	11.153.100	
		1.05.01.2.01.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dok.	2	11.948.000	2	12.545.400	
		1.05.01.2.01.00.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26	Lap.	26	14.040.000	26	14.742.000	
		1.05.01.2.01.00.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Lap.	8	10.000.000	8	10.500.000	
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	95	%	95	6.372.439.521	95	6.696.634.081	Sekretariat
		1.05.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.260	OB	2.270	6.099.009.521	2.293	6.403.959.997	Sub Bagian Keuangan
		1.05.01.2.02.00.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	190	Dok.	190	235.976.000	190	247.774.800	
		1.05.01.	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	135	Dok.	135	28.825.200	135	30.266.460	

	2.02.00 04	Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
	1.05.01. 2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap.	1	3.580.200	1	3.759.210	
	1.05.01. 2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Lap.	4	2.556.800	4	3.936.807	
	1.05.01. 2.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dok.	1	2.491.800	1	3.936.807	
	1.05.01. 2.02.00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen BahanmTanggapanmPemeriksaa n dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dok.	1	0	1	3.000.000	
	1.05.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daearah		%	95	2.000.000	95	6.000.000	Sekretariat
	1.05.01. 2.03.00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dok.	1	1.000.000	1	3.000.000	Sub Bagian Umum dan Aparatur
	1.05.01. 2.03.00 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Lap.	1	1.000.000	1	3.000.000	
	1.05.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	95	%	95	41.000.000	95	100.000.000	Sekretariat
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Org	5		6		Bid. PKP
	1.05.01. 2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Pkt	1	30.000.000	1	50.000.000	Sub Bagian Umum dan Aparatur
	1.05.01. 2.05.00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dok.	4	5.000.000	4	10.000.000	
	1.05.01. 2.05.00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	571	Dok.	580	5.000.000	597	10.000.000	
	1.05.01. 2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Org	5	1.000.000	6	30.000.000	Bid. PKP
	1.05.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	%	95	400.803.710	95	449.331.000	Sekretariat
	1.05.01. 2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Pkt	1	9.000.000	1	20.000.000	Sub Bagian Umum dan Aparatur
	1.05.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Pkt	1	42.583.710	1	50.000.000	
	1.05.01. 2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Pkt	1	5.000.000	1	10.000.000	
	1.05.01. 2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Pkt	1	70.000.000	1	73.500.000	
	1.05.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Pkt	1	15.000.000	1	15.750.000	
	1.05.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Dok.	48	6.120.000	48	6.426.000	
	1.05.01. 2.06.00 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan		Pkt	1	1.000.000	1	5.000.000	
	1.05.01. 2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Lap.	1	1.000.000	1	5.000.000	
	1.05.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182	Lap.	184	200.000.000	190	210.000.000	
	1.05.01. 2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18	Dok.	19	51.100.000	20	53.655.000	

		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	%	95	1.030.000.000	95	2.041.500.000	Sekretariat
		1.05.01.2.07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	4	1.000.000.000	4	2.000.000.000	Sub Bagian Umum dan Aparatur
		1.05.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Pkt	1	10.000.000	1	10.500.000	
		1.05.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	5	20.000.000	5	21.000.000	
		1.05.01.2.07.00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		0		0	
		1.05.01.2.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		0	1	5.000.000	
		1.05.01.2.07.00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		0	1	5.000.000	
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	%	95	1.993.780.750	95	2.188.556.325	Sekretariat
		1.05.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300	Lap.	788	4.000.000	804	4.200.000	Sub Bagian Umum dan Aparatur
		1.05.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Lap.	144	70.800.000	144	74.340.000	
		1.05.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Lap.	33	17.250.000	35	18.112.500	
		1.05.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	759	Lap.	770	1.901.730.750	793	2.091.903.825	
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	89,00	%	88,00	198.000.000	87,00	212.150.000	Sekretariat
		1.05.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9.995	Lap.	15.523	183.000.000	15.833	192.150.000	Sub Bagian Umum dan Aparatur
		1.05.01.2.09.00 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Web	1	15.000.000	1	20.000.000	
		1.05.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	Gdung		0		0	
Meningkatnya kondusifitas wilayah				Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Ideks	100	1.069.969.840	100	1.331.668.332	Kasat
	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%	%	100	1.069.969.840	100%	1.331.668.332	
				Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%	%	100				
				Rasio Petugas LINMAS	1,60	Linmas/ TPS	2,00				
				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	720	Org	300				
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan	100%	%	100	802.100.000	100%	979.855.000	Bidang Penegakan

		Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	1,60	Linmas/ TPS	2,00		2,00		dan Operasi
			Rasio Petugas LINMAS							Bid. LINMAS
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya							Bid. PKP
	1.05.02. 2.01.00 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33	Dok.	33	110.000.000	35	115.500.000	Bid. LINMAS
	1.05.02. 2.01.00 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	720	Org	300	130.000.000	330	136.500.000	Bid. PKP
	1.05.02. 2.01.00 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Dok.	1	1.000.000	1	20.000.000	Bid. PO
	1.05.02. 2.02.00 05	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Dok.	1	1.000.000	1	10.000.000	Bid. PO
	1.05.02. 2.01.00 10	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja		Org	10	1.000.000	11	50.000.000	Bid. PKP
	1.05.02. 2.01.00 11	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	2	Tim	2	1.000.000	2	5.000.000	Bid. PKP
	1.05.02. 2.01.00 12	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan		Org	5	1.000.000	5	20.000.000	Bid. PKP
	1.05.02. 2.01.00 13	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	Org	20	1.000.000	21	20.000.000	Bid. PKP
	1.05.02. 2.01.00 14	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		Org	50	1.000.000	53	20.000.000	Bid. PKP
	1.05.02. 2.01.00 15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	24	Lap.	24	500.000.000	25	525.000.000	Bid. PO
	1.05.02. 2.01.00 16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	Lap.	12	50.000.000	13	52.500.000	Bid. PO
	1.05.02. 2.01.00 17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	8	Lap.	8	5.100.000	8	5.355.000	Bid. PO

		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	%	100	64.869.840	100	186.813.332	Bid. PO
		1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Lap.	3	1.000.000	3	20.000.000	Bid. PO
		1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Dok.	1	1.000.000	1	5.000.000	
		1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah		Unit	2	1.000.000	2	10.000.000	
		1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Lap.	5	1.000.000	5	20.000.000	
		1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan		Kasus	4	1.000.000	4	50.000.000	
		1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		Dok.	4	1.000.000	4	20.000.000	
		1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	Lap.	3	18.869.840	3	19.813.332	
		1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	5	Lap.	7	20.000.000	7	21.000.000	
		1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	360	Lap.	560	20.000.000	566	21.000.000	
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang Aktif	0	%	100	203.000.000	100	165.000.000	Bid. PKP
		1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS		SK	1	1.000.000	1	30.000.000	Bid. PKP
		1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Dok.	1	1.000.000	1	30.000.000	Bid. PKP
		1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		Org	2	200.000.000	1	100.000.000	Bid. PKP
		1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS		Lap.	1	1.000.000	1	5.000.000	Bid. PKP
						TOTAL		11.190.430.821	13.112.398.588	-	
						L					

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Juli 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BAHTIAR, S.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671010 199703 1 007

Tabel 4. 1 Link/ URL Download RENJA dan Dokumen SAKIP

No	Dokumen	Link/ Alamat Web/ Url	Password		Ket
			Proteksi	Download	
1	Renstra	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renstra-rencana-strategis/			
2	Renja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renja-rencan-kerja/			
3	IKU	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja-utama/			
4	IKI	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/iki-indikator-kinerja-individu/			
5	Peta Proses Bisnis	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/peta-proses-bisnis/			
6	Cascading	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/cascading/			
7	Perjanjian Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja-utama/perjanjian-kinerja/	pk20\[\$%	bjhd2985	
8	Rencana Aksi Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rencana-aksi-kinerja/	rak3\$@19	hghd640d7fo	
9	Monitoring Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-rencana-aksi-atas-kinerja/	tr3**##19		
10	Evaluasi Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja/	eka”+58		
11	Laporan Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/lakip/	vsi_@^?]\.	jdktrqw1063	
12	LPPD	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/lppd/	bn269#^3>?;"[}	vdkw52047	
13	Laporan Aset	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-aset/	l630nfl',10\$	agsbvp2063	
14	Pohon Kinetja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/pohon-kinerja/			